

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN PASURUAN DALAM MENANGGULANGI PENGANGGURAN TAHUN 2022-2024

Vernadhea Nur Azizah Mahulauw¹, Khoiron², Suyeno³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Islam Malang, Jl MT Haryono 193 Malang, 65144 Indonesia
Email: vernadhea14@gmail.com*

ABSTRAK

Pengangguran merupakan tantangan utama dalam pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Pasuruan yang memiliki potensi kawasan industri namun mengalami penurunan angka pengangguran yang relatif lambat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan dalam menanggulangi pengangguran selama periode 2022-2024 dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari 4 pegawai bidang sekretariat, pelatihan, hubungan industrial, serta penempatan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek konteks, kebijakan telah dirancang untuk merespons tingginya angka pengangguran dan mulai menyasar kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan purna PMI. Namun, dari aspek input, pelaksanaan kebijakan masih terkendala keterbatasan anggaran, instruktur, dan fasilitas pelatihan. Secara proses, program seperti job fair dan HelloWork sudah berjalan baik, meskipun masih terbatas pada kalangan tertentu. Sedangkan dari aspek produk, terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), namun outcome kebijakan belum sepenuhnya optimal akibat adanya mismatch antara kompetensi lulusan pelatihan dan kebutuhan industri. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerja sama lintas sektor, pembaruan sarana pelatihan, serta pemanfaatan teknologi secara lebih merata.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pengangguran, Model CIPP, Dinas Ketenagakerjaan, Kabupaten Pasuruan

Pendahuluan

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan krusial dalam sektor ketenagakerjaan yang dihadapi oleh hampir setiap negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia (Haerusman & Khoirudin, 2023: 4). Fenomena ini tidak hanya menjadi isu yang bersifat domestik atau nasional, tetapi juga telah berkembang menjadi sebuah tantangan global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik dalam skala individu, masyarakat, maupun negara secara keseluruhan. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang terus dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2024, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 215,37 juta orang, mengalami peningkatan dibandingkan Februari 2024 (BPS, 2024: 1). Meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi dan berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan oleh pemerintah, tingkat pengangguran terbuka (TPT) (Meydiasari, 2017: 6).

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2024: 3), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada Agustus 2024

tercatat mencapai 4,91%, menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,41% dibandingkan dengan Agustus 2023. Penurunan ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya pemerintah dalam menekan angka pengangguran mulai menunjukkan hasil yang positif (Syuhada & Shasrini, 2024: 2). Berbagai program ketenagakerjaan, seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja, pelatihan kerja berbasis kompetensi, serta kemitraan dengan industri dalam penempatan tenaga kerja, telah diterapkan untuk membantu masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai dengan keahlian mereka. Namun, meskipun angka pengangguran nasional mengalami penurunan, kondisi di tingkat daerah menunjukkan variasi yang cukup beragam. Beberapa wilayah, terutama yang memiliki sektor industri yang berkembang pesat, mengalami penurunan angka pengangguran yang cukup signifikan, sementara daerah lain masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam menekan angka pengangguran (Frisnoiry, 2024: 371).

Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai salah satu pusat industri terbesar di Indonesia, dinamika ketenagakerjaan menunjukkan kompleksitas tersendiri. Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo, dua daerah yang

berada dalam kawasan industri utama RING 1 di Jawa Timur, seharusnya memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan. Namun, berdasarkan data BPS Jawa Timur, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pasuruan selama periode 2022-2024 mengalami penurunan yang relatif lambat dibandingkan dengan Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo mencatat penurunan angka pengangguran lebih dari 2% dalam tiga tahun terakhir dari tahun 2022 sebesar 8,80% hingga data menunjukkan di tahun 2024 sebesar 6,49%, sedangkan Kabupaten Pasuruan hanya mengalami penurunan sebesar 0,89% tidak sampai 1% dari tahun 2022 sebesar 5,91% hingga ke tahun 2024 sebesar 5,02%. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan ketenagakerjaan yang telah diterapkan di Kabupaten Pasuruan serta faktor-faktor yang menghambat penurunan angka pengangguran di daerah tersebut (Maria, 2024: 5).

Selama periode 2022-2024, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Ketenagakerjaan telah melaksanakan berbagai program penanggulangan pengangguran yang mencakup pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK), penyelenggaraan bursa kerja (*job fair*), pemanfaatan sistem informasi ketenagakerjaan *HelloWork*, pengembangan kewirausahaan, hingga kerja sama dengan sektor industri. Berbagai program tersebut merupakan bentuk implementasi dari kebijakan ketenagakerjaan daerah yang didukung oleh regulasi, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, serta Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Kedua Perda tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program strategis ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan.

Melalui model evaluasi ini, penelitian bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan berhasil menekan angka pengangguran. Selain itu, evaluasi ini juga digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan angka pengangguran di Kabupaten Pasuruan lebih lambat dibandingkan dengan Kabupaten Sidoarjo yang memiliki karakteristik wilayah industri yang serupa. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan yang telah dijalankan dan memberikan wawasan bagi pemangku kepentingan dalam menyusun strategi yang lebih baik ke depan.

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kebijakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan dalam menanggulangi pengangguran tahun 2022-2024.

2. Mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut berdasarkan teori evaluasi kebijakan dengan standar teori CIPP (*Context, Input, Process, Product*) Model dari Daniel L. Stufflebeam.
3. Mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan penurunan angka pengangguran di Kabupaten Pasuruan.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori evaluasi kebijakan, khususnya dalam konteks kebijakan ketenagakerjaan di daerah industri.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menanggulangi pengangguran. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan program ketenagakerjaan di masa mendatang.

Tinjauan Pustaka Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu bentuk keputusan yang diambil oleh aktor-aktor pemerintahan, kebijakan publik mencakup berbagai tahapan mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi terhadap dampaknya. Dalam ranah administrasi publik, kebijakan publik dipandang sebagai instrumen negara untuk mewujudkan tujuan bersama yang telah disepakati secara politik maupun sosial. Di Kabupaten Pasuruan, kebijakan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan meliputi berbagai program seperti pelatihan kerja, penyelenggaraan bursa kerja (*job fair*), penempatan tenaga kerja, hingga pengembangan kewirausahaan. Seluruh program tersebut merupakan bagian dari kebijakan publik yang dirancang untuk merespons kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelatihan Kerja dan Produktivitas serta Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori kebijakan publik menjadi penting dalam penelitian ini sebagai dasar konseptual dalam menganalisis kebijakan ketenagakerjaan.

Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk memahami, menilai, dan merancang kebijakan publik guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan secara optimal. Proses ini tidak hanya terbatas pada pemecahan masalah publik, tetapi juga mencakup identifikasi berbagai pilihan kebijakan, penentuan strategi implementasi yang tepat, serta evaluasi terhadap efek dari kebijakan yang telah dijalankan. Dunn (2018: 76) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai suatu disiplin ilmu yang memanfaatkan metode ilmiah dan logika rasional untuk menghasilkan informasi yang relevan dan dapat dipercaya sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Dalam konteks ketenagakerjaan, analisis kebijakan berperan penting dalam menilai sejauh mana tujuan program sejalan dengan persoalan nyata di lapangan, seperti tingginya tingkat pengangguran, ketidaksesuaian antara keahlian tenaga kerja dan kebutuhan industri, serta terbatasnya akses terhadap informasi pasar kerja. Dengan demikian, pendekatan analisis kebijakan memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menilai efektivitas kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan dalam menjawab berbagai tantangan tersebut secara sistematis dan terukur.

Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik karena pada fase inilah kebijakan yang telah disusun mulai diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata di lapangan. Tanpa pelaksanaan yang optimal, kebijakan hanya akan menjadi dokumen formal yang tidak memberikan perubahan berarti bagi masyarakat. Meter dan Horn (1975: 464) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga yang diberi wewenang untuk merealisasikan keputusan kebijakan.

Dalam konteks penelitian ini, implementasi kebijakan ketenagakerjaan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan mencakup pelaksanaan program-program seperti pelatihan tenaga kerja, layanan bursa kerja, penempatan tenaga kerja, hingga pengembangan kewirausahaan, yang harus disesuaikan dengan tujuan serta ketentuan kebijakan yang berlaku. Oleh karena itu, penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana program-program tersebut dijalankan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

CIPP Model Dalam Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan suatu proses sistematis untuk menilai manfaat dan nilai dari suatu program, proyek, layanan, atau objek lainnya yang dianggap penting. Dalam praktiknya, evaluasi dilakukan melalui proses pengumpulan, penggambaran, pelaporan, dan penggunaan informasi yang bersifat deskriptif serta evaluatif

guna menilai nilai suatu objek. Tujuan utamanya adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas, menyebarkan praktik terbaik, dan memperdalam pemahaman terhadap fenomena yang dikaji.

Salah satu pendekatan evaluasi yang banyak digunakan adalah Model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam. Model ini dirancang untuk mengevaluasi kebijakan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan konteks kebijakan, sumber daya yang dimanfaatkan, pelaksanaan program, serta hasil yang diperoleh. Evaluasi dalam kerangka CIPP bertujuan untuk memberikan penilaian yang komprehensif terhadap suatu kebijakan atau program dengan memperhatikan berbagai elemen yang dapat memengaruhi keberhasilan atau nilainya. Pendekatan ini menekankan pada sistematika dan objektivitas dalam pelaksanaannya, sehingga hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif.

Model CIPP berlandaskan pendekatan objektif, yaitu sebuah pandangan bahwa nilai moral bersifat universal dan tidak tergantung pada opini atau perasaan individu. Evaluasi dengan pendekatan ini dilakukan berdasarkan prinsip etika yang bertujuan untuk meminimalkan bias, prasangka, dan konflik kepentingan dalam menilai kebaikan dan nilai suatu objek (Agustina et al., 2018: 266). Evaluasi tersebut juga bertumpu pada standar moral yang sah dan valid, memperoleh informasi dari berbagai sumber, serta menyusun kesimpulan berdasarkan bukti terbaik yang tersedia. Hasil evaluasi kemudian dilaporkan secara jujur, adil, dan cermat kepada pihak yang berkepentingan, serta dibuka untuk penilaian ulang guna menjaga validitasnya. Evaluasi CIPP terdiri dari empat komponen utama, yaitu evaluasi konteks, masukan, proses, dan produk. Evaluasi konteks bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, masalah, dan peluang dalam merumuskan tujuan dan prioritas yang tepat. Evaluasi masukan berfokus pada penilaian terhadap alternatif strategi dan perencanaan program.

Evaluasi proses digunakan untuk memantau pelaksanaan program agar tetap berjalan sesuai rencana serta menjelaskan hasil yang diperoleh (Filiarsari & Setiawan, 2021: 2). Sedangkan evaluasi produk bertujuan menilai hasil yang dicapai, baik yang direncanakan maupun tidak, sebagai dasar dalam menentukan efektivitas program secara keseluruhan. Melalui keempat komponen ini, evaluasi CIPP memberikan panduan menyeluruh bagi para pengambil kebijakan, pelaksana program, maupun penyedia layanan dalam merancang, menjalankan, dan meningkatkan kualitas program atau kebijakan yang diterapkan.

Model ini terdiri dari empat komponen utama:

- a. Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)

Evaluasi konteks merupakan tahap awal dalam model evaluasi CIPP yang menekankan pada pemahaman terhadap latar belakang program atau kebijakan. Tahapan ini mencakup identifikasi kebutuhan, masalah, potensi sumber daya (aset), serta peluang yang relevan dengan lingkungan tempat kebijakan diterapkan. Evaluasi konteks bertujuan untuk memberikan dasar yang kuat dalam merumuskan tujuan program dan menetapkan prioritas intervensi. Evaluasi konteks bertujuan untuk meninjau kondisi lingkungan program, termasuk kebutuhan, permasalahan, potensi sumber daya, serta peluang yang tersedia.

Kebutuhan merujuk pada hal-hal yang diperlukan guna mencapai tujuan program yang berkelanjutan. Sementara itu, permasalahan merupakan hambatan yang harus diatasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Aset mencakup sumber daya seperti keahlian atau layanan lokal yang dapat dimanfaatkan, dan peluang biasanya mengarah pada dukungan atau pendanaan eksternal yang bisa diakses. Keempat aspek ini perlu diperhatikan secara menyeluruh karena menjadi dasar dalam merancang program yang tepat sasaran. Meskipun sering disamakan dengan penilaian kebutuhan (*needs assessment*), evaluasi konteks memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya memfokuskan pada kebutuhan, namun juga mempertimbangkan hambatan, aset, dan potensi dukungan dari luar.

b. Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)

Evaluasi masukan dalam model CIPP bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan mengenai pendekatan program atau intervensi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap strategi program yang diajukan, perencanaan operasional, serta alokasi sumber daya seperti anggaran dan tenaga kerja. Evaluator dituntut untuk menilai kelayakan pendekatan tersebut dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap kebutuhan penerima manfaat, hambatan yang mungkin timbul, serta potensi keberhasilannya. Berdasarkan hal tersebut, evaluasi masukan menjadi krusial karena menentukan arah dan fondasi dari keseluruhan pelaksanaan program. Informasi dari tahap ini juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak terkait mengenai pemilihan strategi dan

pengelolaan sumber daya dalam kebijakan yang sedang dievaluasi.

Evaluasi terhadap masukan memiliki peran penting sebagai indikator awal dari keberhasilan, kegagalan, maupun efisiensi dalam proses perubahan. Keputusan awal dalam pengalokasian sumber daya akan memengaruhi sejauh mana perbaikan dapat dilakukan. Sebuah solusi yang berpotensi efektif tidak akan memberikan dampak apa pun apabila tim perencana tidak mampu mengenali dan mengevaluasi manfaat dari solusi tersebut (Ansar & Judho, 2019: 148). Pada dasarnya, evaluasi masukan harus mengidentifikasi dan menilai pendekatan yang relevan serta membantu para pengambil keputusan untuk mempersiapkan pendekatan yang dipilih untuk dilaksanakan.

c. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Dalam model CIPP, evaluasi proses menitikberatkan pada kegiatan pemantauan dan penilaian secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan suatu program. Tujuannya adalah untuk menyediakan umpan balik yang konstruktif kepada pelaksana agar kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan, memiliki jadwal yang teratur, serta berlangsung secara efisien. Evaluasi ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi kendala yang muncul selama proses implementasi dan menawarkan solusi atau penyesuaian yang diperlukan guna meningkatkan mutu pelaksanaan. Oleh karena itu, evaluasi proses memainkan peran strategis dalam memastikan program tetap berada pada jalur yang benar. Temuan dari evaluasi ini tidak hanya berperan sebagai alat kontrol, tetapi juga menjadi dasar untuk melakukan perbaikan selama program masih berlangsung. Proses dokumentasi terhadap revisi rencana, kendala yang dihadapi, serta cara penyelesaiannya, menjadi bagian penting dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan program. Evaluasi proses perlu membandingkan antara pelaksanaan aktual dengan perencanaan awal, mengungkap permasalahan implementasi, serta mengevaluasi kemampuan tim dalam menanggapinya. Selain itu, evaluasi juga harus mencakup analisis terhadap biaya yang dikeluarkan dan memberikan laporan mengenai penilaian dari pengamat maupun peserta terkait kualitas pelaksanaan program (Zulfiyandi et al., 2023: 277).

d. Evaluasi Produk (*Product Evaluation*)

Evaluasi produk merupakan tahapan penting dalam model CIPP yang berfokus

pada penilaian hasil akhir dari suatu program atau kebijakan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan program telah tercapai dan apakah manfaat yang dihasilkan sepadan dengan sumber daya yang telah digunakan. Evaluator menilai baik hasil yang diharapkan maupun yang tidak diantisipasi, termasuk dampak positif dan negatif yang muncul selama atau setelah pelaksanaan program.

Selain mengukur capaian program, evaluasi produk juga mengumpulkan umpan balik dari pemangku kepentingan dan membandingkan hasil program dengan hasil dari program sejenis jika diperlukan. Evaluasi ini menjadi dasar bagi pihak pengambil kebijakan, penyandang dana, dan calon pengadopsi program dalam menentukan kelayakan keberlanjutan atau penghentian program. Oleh karena itu, hasil evaluasi produk perlu dikaitkan dengan temuan dari evaluasi konteks, masukan, dan proses untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap keberhasilan atau kegagalan program.

Evaluasi dalam Model CIPP tidak hanya berfokus pada hasil yang telah direncanakan, tetapi juga mempertimbangkan dampak lain yang mungkin muncul selama atau setelah implementasi kebijakan. Dengan pendekatan ini, evaluasi dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas suatu program serta mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki (Akbar, 2018: 69).

Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi kebijakan program Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan dalam menanggulangi pengangguran tahun 2022-2024 secara mendalam. Penelitian kualitatif bersifat eksploratif dan berusaha mengungkap makna di balik fenomena yang terjadi di lapangan.

Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai efektivitas kebijakan ketenagakerjaan. Dengan metode ini, penelitian dapat mengungkap bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, kendala yang dihadapi, serta dampak yang ditimbulkan dalam upaya menekan angka pengangguran. Melalui analisis yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai keberhasilan maupun kelemahan kebijakan yang telah diterapkan.

Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2011:152), penentuan fokus dalam penelitian memiliki dua tujuan utama. Pertama, fokus digunakan untuk mempersempit cakupan kajian agar studi yang dilakukan tidak melebar ke luar batas inkuiri yang ditetapkan. Kedua, fokus penelitian berperan dalam menyaring informasi yang diperoleh di lapangan, dengan menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi terhadap data yang relevan atau tidak relevan dengan kebutuhan penelitian.

Penelitian ini memfokuskan evaluasi terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan dalam menanggulangi pengangguran selama periode 2022-2024. Evaluasi dilakukan menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dari Stufflebeam, dengan fokus pada empat program utama: pelatihan kerja berbasis kompetensi, bursa kerja (*job fair*), penempatan kerja dan hubungan industrial, serta digitalisasi layanan melalui platform *HelloWork*.

Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan keempat komponen CIPP:

- Context*: Menilai urgensi kebijakan berdasarkan kondisi pengangguran lokal, daya saing angkatan kerja, serta arah perencanaan strategis daerah.
- Input*: Mengkaji sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan program.
- Process*: Mengevaluasi proses pelaksanaan teknis di lapangan, efektivitas pelaksanaan *job fair*, pemanfaatan *HelloWork*, dan mekanisme TNA.
- Product*: Menilai hasil kebijakan, seperti penurunan TPT, peningkatan kompetensi kerja, keberhasilan penempatan kerja, serta outcome sosial berupa kewirausahaan alumni.

Situs dan Latar Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana proses pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kesesuaiannya sebagai objek kajian yang dapat memberikan data yang valid dan mendalam. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, karena merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pengelolaan dan pelaksanaan program ketenagakerjaan di daerah tersebut.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten

Pasuruan. Data primer diperoleh secara langsung melalui kegiatan penelitian lapangan, khususnya wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan penjelasan yang jelas dan rinci mengenai fakta dari fenomena yang diamati.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan, seperti laporan pelaksanaan program Dinas Ketenagakerjaan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS), regulasi daerah, jurnal ilmiah, situs resmi *HelloWork*, serta penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan ketenagakerjaan. Penggunaan data dari kedua sumber ini bertujuan untuk memastikan validitas informasi melalui triangulasi data serta memperkaya konteks analisis dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan dilakukan menggunakan metode purposive sampling, yaitu suatu pendekatan pengambilan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Sugiyono (2017:85) menjelaskan bahwa purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel yang dipilih secara sengaja karena dianggap memiliki pengetahuan atau pemahaman yang relevan dengan fokus penelitian, atau karena posisinya yang strategis sehingga dapat mempermudah peneliti dalam menggali data dari objek maupun situasi sosial yang diteliti. Adapun dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Observasi
Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan. Peneliti mencatat kondisi fasilitas, pelaksanaan program, dan interaksi antarpelaksana sebagai bagian dari pemahaman konteks dan proses kebijakan di lapangan.
- b) Wawancara
Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada empat informan kunci dari masing-masing bidang. Pertanyaan disusun berdasarkan komponen evaluasi CIPP guna menggali informasi yang relevan terkait pelaksanaan pelatihan kerja, *job fair*, *HelloWork*, serta penempatan dan hubungan industrial.
- c) Dokumentasi
Dokumentasi mencakup foto kegiatan, rekaman wawancara, data internal Disnaker terkait pencari dan penempatan kerja, serta dokumen resmi seperti laporan pelaksanaan program dan data statistik pengangguran dari BPS. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data primer dan menunjang validitas hasil penelitian.

Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang mencakup empat tahap utama, yaitu proses pengumpulan data, penyaringan atau reduksi data, penyajian data secara sistematis, serta penarikan kesimpulan dan proses verifikasi.

1. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan empat informan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, observasi langsung selama 10-17 Juni 2025, serta dokumentasi berupa foto kegiatan, data internal pencari kerja dan penempatan, serta data pengangguran dari BPS. Seluruh data dikumpulkan secara sistematis sesuai kebutuhan evaluasi berbasis model CIPP.

2. Reduksi Data

Data yang telah diperoleh kemudian disaring, diringkas, dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan komponen evaluasi CIPP: konteks, input, proses, dan produk. Reduksi dilakukan untuk menyusun pola-pola temuan, menyederhanakan data mentah, dan memperjelas hubungan antara informasi dengan fokus penelitian.

3. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan kutipan wawancara yang dikodekan berdasarkan bidang kerja. Penyajian ini mempermudah analisis tematik dan membantu menghubungkan antara temuan empiris dengan dimensi evaluasi kebijakan.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan diperoleh melalui interpretasi mendalam terhadap data yang telah disajikan, dan diverifikasi secara berkelanjutan selama proses penelitian. Kesimpulan tidak hanya mencerminkan efektivitas program, tetapi juga memberikan refleksi kritis dan saran untuk perbaikan kebijakan ketenagakerjaan di masa depan.

Pembahasan

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketenagakerjaan. Lembaga ini berperan penting dalam mendukung terciptanya tenaga kerja yang kompeten, produktif, serta mampu bersaing di dunia kerja, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Dengan cakupan tugas yang luas dan kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan yang terus berkembang, Dinas Ketenagakerjaan

Kabupaten Pasuruan memegang peranan strategis dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang sehat, adaptif, dan responsif terhadap dinamika pasar kerja.

Ketidaksesuaian Program dengan Kebutuhan Industri dan Pasar Kerja (*Context Evaluation*)

Dalam kerangka evaluasi model CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam, aspek konteks (*context*) berfungsi untuk menilai latar belakang, kebutuhan, dan lingkungan yang mendasari lahirnya suatu kebijakan atau program. Evaluasi konteks bertujuan menjawab apakah program tersebut layak dan relevan dijalankan berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

Masalah utama dalam konteks kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan adalah ketidaksesuaian antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri lokal. Sebagai daerah dengan kawasan industri besar, Pasuruan memiliki potensi penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Namun, data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih cukup tinggi karena pencari kerja lokal tidak mampu memenuhi standar keterampilan yang dibutuhkan oleh sektor industri. Hal ini mencerminkan adanya mismatch kompetensi yang menjadi faktor dominan penyebab pengangguran struktural. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan telah merespons kondisi tersebut dengan merumuskan sejumlah kebijakan, seperti pelatihan kerja berbasis kompetensi, penyelenggaraan *job fair*, penguatan hubungan industrial, serta digitalisasi layanan melalui platform *HelloWork*. Kebijakan ini disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan seperti RPJMD Kabupaten Pasuruan dan regulasi sektoral ketenagakerjaan. Secara konseptual, arah kebijakan sudah tepat, yakni berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia agar lebih adaptif terhadap kebutuhan industri.

Namun demikian, evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya berbasis pada pemetaan kebutuhan industri yang sistematis. Tidak ada sistem terpadu yang secara rutin mengidentifikasi jenis keterampilan yang dibutuhkan sektor industri di Pasuruan, termasuk keterampilan teknis dan *soft skills*. Hal ini membuat perencanaan pelatihan kerja cenderung bersifat umum dan tidak kontekstual, sehingga lulusan pelatihan belum memiliki daya saing optimal di pasar kerja lokal. Selain itu, sebagian besar pelatihan masih difokuskan pada kejuruan yang tidak selalu relevan dengan tren kebutuhan industri terbaru, seperti manufaktur berbasis otomasi, digitalisasi proses produksi, atau logistik modern. Ketimpangan antara desain pelatihan dan permintaan industri menyebabkan hasil kebijakan cenderung kurang responsif terhadap dinamika pasar tenaga kerja.

Secara keseluruhan, kebijakan penanggulangan pengangguran di Pasuruan telah dirumuskan dengan dasar kebutuhan lokal yang

jelas, namun belum didukung oleh sistem data dan analisis kebutuhan yang kuat. Hal ini berdampak pada efektivitas program pelatihan dan penempatan kerja yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam menjawab masalah mismatch kompetensi di daerah industri. Dengan demikian, dari sudut pandang evaluasi konteks menurut model CIPP, program yang dijalankan tergolong relevan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek need assessment dan stakeholder analysis agar penyusunan kebijakan lebih berbasis bukti dan kebutuhan aktual pasar kerja lokal.

Keterbatasan Sumber Daya dan Dukungan Program Ketenagakerjaan (*Input Evaluation*)

Dalam model evaluasi CIPP, komponen input berfungsi untuk menilai kelayakan sumber daya, strategi, dan rencana operasional yang digunakan dalam pelaksanaan program. Evaluasi pada aspek ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan memiliki fondasi yang memadai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Stufflebeam, 2014).

Keberhasilan program pelatihan kerja sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya yang dimiliki, baik dari segi fasilitas, instruktur, anggaran, maupun sistem pendukung lainnya. Di Kabupaten Pasuruan, Balai Latihan Kerja (BLK) Rejoso menjadi pusat pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pelatihan di BLK belum memadai untuk menjawab tantangan kebutuhan industri modern. Sebagian peralatan pelatihan masih menggunakan teknologi lama yang tidak lagi relevan dengan standar industri 4.0. Jurusan pelatihan yang tersedia juga terbatas dan belum mencakup sektor-sektor dengan permintaan tinggi, seperti pengelolaan data digital, sistem otomasi, logistik, dan pengemasan modern. Selain itu, jumlah instruktur bersertifikasi nasional masih belum mencukupi, dan pelatihan instruktur juga belum rutin dilakukan sebagai bagian dari pembaruan kompetensi pengajar.

Kondisi ini diperburuk dengan belum adanya sistem tracer alumni, yang seharusnya dapat digunakan untuk menilai dampak pelatihan secara jangka panjang. Tanpa data alumni, Disnaker kesulitan melacak apakah peserta pelatihan berhasil mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha mandiri. Padahal informasi ini sangat penting untuk menilai efektivitas program dan melakukan perbaikan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Selain itu, koordinasi antarbidang dalam internal Dinas Ketenagakerjaan belum berjalan maksimal, terutama antara bidang pelatihan dan bidang penempatan kerja. Akibatnya, lulusan pelatihan tidak secara otomatis masuk dalam sistem penempatan kerja, dan tidak semua peserta pelatihan memperoleh akses pada informasi lowongan yang relevan. Hal ini menghambat kesinambungan antara

proses pelatihan dan peluang kerja nyata di lapangan.

Minimnya integrasi sistem informasi tenaga kerja juga menjadi penghambat. Platform HelloWork yang telah dikembangkan belum sepenuhnya terhubung dengan data pelatihan, penempatan kerja, maupun kebutuhan industri. Jika platform ini dapat dioptimalkan, maka bisa menjadi alat penting untuk menyatukan data pelatihan, lowongan kerja, dan profil pencari kerja secara lebih efisien. Dengan demikian, berdasarkan komponen input dalam model CIPP, kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan masih menghadapi tantangan serius dalam kesiapan operasional, kualitas sumber daya, serta sistem pendukung pelaksanaan program. Perbaikan dalam aspek input ini menjadi kunci keberhasilan tahapan implementasi selanjutnya.

Kendala Pelaksanaan dan Lemahnya Koordinasi Program Ketenagakerjaan (*Process Evaluation*)

Dalam model evaluasi CIPP, komponen proses (*process*) digunakan untuk menilai bagaimana kebijakan atau program dilaksanakan di lapangan. Evaluasi pada aspek ini menyoroti efektivitas mekanisme pelaksanaan, koordinasi antarunit, serta kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan awal (Stufflebeam, 2014). Tujuannya adalah memastikan bahwa implementasi program berjalan sesuai prosedur dan mampu menjawab tujuan yang telah dirancang.

Salah satu kelemahan menonjol dalam pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan terletak pada tahap proses, khususnya dalam hal ketiadaan analisis kebutuhan pelatihan yang terstruktur serta minimnya koordinasi antarbidang di Dinas Ketenagakerjaan. Meskipun program pelatihan kerja dan *job fair* telah rutin dilaksanakan setiap tahun, pelaksanaannya belum sepenuhnya berbasis pada *Training Need Analysis* (TNA). Tanpa TNA yang memadai, perencanaan pelatihan cenderung generik dan tidak responsif terhadap kebutuhan spesifik industri maupun potensi lokal. Akibatnya, jenis pelatihan yang diberikan sering kali tidak sesuai dengan permintaan riil pasar kerja, dan lulusan pelatihan kesulitan bersaing dalam proses rekrutmen.

Selain itu, koordinasi antarbidang di internal Disnaker masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara strategis. Misalnya, bidang pelatihan dan bidang penempatan kerja belum memiliki mekanisme koordinasi rutin dalam menghubungkan lulusan pelatihan dengan lowongan yang tersedia. Hal ini menyebabkan terputusnya rantai antara peningkatan kompetensi (*output* pelatihan) dan penyaluran tenaga kerja (*outcome* penempatan). Upaya digitalisasi layanan melalui platform *HelloWork* merupakan langkah inovatif untuk menjawab tantangan akses informasi kerja. Namun, pemanfaatannya masih terbatas, baik dari sisi fitur maupun literasi pengguna. Banyak

pencari kerja yang belum mengetahui atau mampu mengakses layanan ini secara optimal, terutama di wilayah pinggiran. Sosialisasi dan pelatihan penggunaan platform digital masih sangat terbatas, padahal platform ini dapat menjadi penghubung strategis antara pencari kerja, pelatihan, dan kebutuhan industri.

Di sisi lain, pelaksanaan *job fair* secara *hybrid* (online dan offline) menunjukkan potensi pengembangan proses penempatan kerja berbasis teknologi. Namun, kegiatan tersebut masih bersifat seremonial dan belum diikuti dengan sistem tindak lanjut yang terintegrasi, seperti evaluasi rekrutmen atau pelaporan hasil rekrutmen oleh perusahaan mitra. Secara umum, lemahnya proses implementasi kebijakan disebabkan oleh tidak adanya mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang terkoordinasi lintas bidang. Tanpa perbaikan proses internal ini, program yang dirancang dengan baik sekalipun akan sulit mencapai hasil optimal.

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang komponen proses dalam model CIPP, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala pada aspek koordinasi dan adaptasi sistem pelaksanaan. Tanpa perbaikan mendasar pada proses implementasi, efektivitas kebijakan berisiko rendah meskipun tujuan dan perencanaannya sudah tepat.

Program Ketenagakerjaan terhadap Penurunan Angka Pengangguran (*Product Evaluation*)

Dalam model evaluasi CIPP, aspek produk (*product*) bertujuan untuk mengevaluasi hasil dari pelaksanaan kebijakan, baik dalam bentuk output (*hasil langsung*) maupun outcome (*dampak jangka panjang*). Evaluasi produk tidak hanya berfokus pada pencapaian target administratif, tetapi juga pada dampak nyata terhadap sasaran program dan efektivitasnya dalam menjawab tujuan awal (Stufflebeam, 2014).

Hasil dari kebijakan ketenagakerjaan yang dijalankan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan menunjukkan kecenderungan positif, ditandai dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 5,91% pada tahun 2022 menjadi 5,02% pada tahun 2024. Selain itu, terdapat sejumlah alumni pelatihan kerja yang berhasil membuka usaha sendiri dan menyerap tenaga kerja baru. Ini menunjukkan bahwa kebijakan telah mulai menghasilkan dampak sosial dan ekonomi, khususnya pada peningkatan kapasitas kerja individu dan penciptaan lapangan kerja mandiri. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya terukur secara sistematis karena tidak adanya sistem pelacakan (*tracer*) alumni yang berkelanjutan dan berbasis digital. Saat ini, Disnaker belum memiliki sistem informasi yang dapat memantau secara real-time perkembangan alumni setelah mengikuti pelatihan, seperti status pekerjaan mereka, jenis usaha yang dijalankan, atau keterkaitan antara

kompetensi yang dimiliki dengan pekerjaan yang diperoleh.

Ketiadaan sistem ini menyebabkan kesulitan dalam mengevaluasi keberhasilan program secara komprehensif, termasuk dalam hal efektivitas pelatihan, relevansi kurikulum, hingga keberlanjutan hasil kebijakan. Tanpa data yang jelas dan terstruktur mengenai outcome, proses perbaikan kebijakan menjadi tidak berbasis bukti, dan potensi penguatan program sulit dioptimalkan. Selain itu, indikator keberhasilan kebijakan masih cenderung bersifat kuantitatif dan administratif (misalnya jumlah peserta pelatihan atau jumlah peserta job fair), tanpa mengukur aspek kualitas seperti kepuasan alumni, keberhasilan penempatan kerja sesuai bidang, atau stabilitas pekerjaan yang diperoleh.

Di sisi lain, beberapa alumni pelatihan justru menunjukkan hasil yang inspiratif, seperti mendirikan UMKM dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Namun, potensi ini belum difasilitasi secara sistematis oleh pemerintah daerah, misalnya melalui pendampingan usaha, akses modal, atau pengembangan jejaring bisnis. Dengan demikian, dari perspektif komponen produk dalam model CIPP, kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan telah memberikan dampak awal yang positif, namun belum dilengkapi sistem evaluasi hasil yang terstruktur dan terintegrasi. Pengembangan sistem pelacakan alumni dan monitoring outcome secara digital menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat evaluasi keberhasilan program secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini mengevaluasi kebijakan penanggulangan pengangguran oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan tahun 2022-2024 menggunakan model CIPP. Hasil menunjukkan bahwa secara konteks, kebijakan relevan dengan kebutuhan daerah, terutama dalam mengatasi mismatch kompetensi kerja. Pada aspek input, terdapat kendala pada sarana pelatihan dan belum tersedianya sistem tracer alumni. Aspek proses menunjukkan lemahnya analisis kebutuhan pelatihan dan koordinasi antarbidang. Sementara pada aspek produk, dampak positif telah terlihat melalui penurunan pengangguran dan keberhasilan sebagian alumni, meski belum terukur secara menyeluruh. Kebijakan ini dinilai layak dilanjutkan dengan penguatan sistem pendukung, integrasi data, dan digitalisasi layanan.

Saran

Berdasarkan hasil evaluasi model CIPP, disarankan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan:

1. Modernisasi pelatihan kerja melalui pembaruan sarana BLK dan adopsi

teknologi industri 4.0, serta pelatihan berbasis kebutuhan sektor lokal.

2. Perluasan akses layanan dengan membentuk pelatihan keliling di wilayah pinggiran dan subsidi transportasi digital berbasis HelloWork.
3. Penguatan sistem digital, termasuk pengembangan tracer alumni dan job matching berbasis AI untuk memantau outcome pelatihan secara real-time.
4. Peningkatan kolaborasi lintas sektor melalui forum TNA rutin dan keterlibatan industri dalam pembiayaan pelatihan melalui skema CSR.
5. Penguatan perlindungan pekerja melalui layanan mediasi ketenagakerjaan digital dan bantuan hukum ketenagakerjaan berbasis POSBAKUM.
6. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan dengan dashboard evaluasi digital serta audit sosial untuk menilai dampak kebijakan secara menyeluruh.

Dengan implementasi saran tersebut, kebijakan ketenagakerjaan diharapkan menjadi lebih responsif, inklusif, dan berdampak nyata dalam menurunkan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pasuruan.

Daftar Pustaka

Literatur Jurnal

- Agustina, E., Syechalad, M. N., & Hamzah, A. (2018). Pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 4(2), 265-283. <https://jurnal.usk.ac.id/JPED/article/view/13022>
- Ainurosida, A., Afifuddin, A., & Sekarsari, R. W. (2025). Peran Dinas Tenaga Kerja dalam perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Malang. *Jurnal Respon Publik*, 19(1), 32–40. <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11804>
- Budhijana, R. B. (2019). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, index pembangunan manusia (IPM) dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia Tahun 2000-2017. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 5(1), 36-44. <https://doi.org/10.35384/jemp.v5i1.170>
- Filiarsari, A., & Setiawan, A. H. (2021). Pengaruh Angkatan Kerja, Upah, PDRB, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten Tahun 2002-2019. *Diponegoro Journal of*

- Economics, 10(2).
<https://doi.org/10.14710/djoe.31615>
- Frisnoiry, S., Sihotang, H. M., Indri, N., & Munthe, T. (2024). Analisis Permasalahan Pengangguran Di Indonesia. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 17(1), 366-375.
<https://doi.org/10.51903/kompak.v17i1.1866>
- Hia, Y. D. (2015). Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran. *ECONOMICA: Journal of Economic and Economic Education*, 1(2), 208-213.
<https://doi.org/10.22202/economica.2013.v1.i2.121>
- Ishak, K. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasi Terhadap Indeks Pembangunan Di Indonesia. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7(1), 22-38.
<https://ejournal.isnjbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/121>
- Khoirudin, R., & Haerusman, A. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2022. *Journal of Regional Economics and Development*, 1(1), 1-9.
<https://doi.org/10.47134/jred.v1i1.20>
- Latifa, I., & Pribadi, F. (2021). Peran Lembaga Pendidikan Nonformal dalam Mengatasi Pengangguran di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 3(3), 137-146.
<https://doi.org/10.23887/jpsu.v3i3.45781>
- Mardiyah, W., Ati, N. U., & Suyeno. (2022). Implementasi program Balai Latihan Kerja dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa Kebuntelukdalam Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. *Jurnal Respon Publik*, 16(1), 75-84.
<http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/3354>
- Meydiasari, D. A., & Soejoto, A. (2017). Analisis pengaruh distribusi pendapatan, tingkat pengangguran, dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap IPM di Indonesia. *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen dan Keuangan*, 1(2), 116-126.
<https://doi.org/10.26740/jpeka.v1n2.p116-126>
- Novitasari, T., & Hertati, D. (2022). Evaluasi Program Bursa Kerja (Job Fair) Dalam Penanggulangan Angka Pengangguran Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(2), 299-305.
<https://doi.org/10.29303/jseh.v8i2.98>
- Prianto, A., & Sulhan, M. (2020). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Industri di Jawa Timur yang Berwawasan Sumber Daya Manusia dalam Sustainability Development. Volume, 5, 63-64.
<https://pdfs.semanticscholar.org/6cd0/993746fa7edd6ae81697363f4513e3df20f3.pdf>
- Sari, C. N. I., Sangidah, S. N. S., Aufiary, M. S., Hilmi, F. F., & Gunawan, A. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. *Inovasi dan Kreativitas dalam Ekonomi*, 7(12).
<https://oaj.jurnalhst.com/index.php/ike/article/view/7931>
- Suaidah, I. (2013). Pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jombang. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3).
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/download/3739/6301>
- Subagyo, A., Anggrairi, E. S., & Radiano, D. O. (2019). Analisis pengaruh fasilitas pendidikan terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan di wilayah indonesia tahun 2018. *Jurnal Pendidikan: Riset Dan Konseptual*, 3(2), 109-115.
https://doi.org/10.28926/riset_konseptual.v3i2.114
- Wijayanto, H., & Olde, S. (2020). Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 13(1), 85-94.
<https://doi.org/10.46306/jbbe.v13i1.33>
- Zakia, N. A. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kota Pasuruan. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 7(1), 22-29.
<https://doi.org/10.29407/jae.v7i1.17673>

Buku

- Akbar, M. F. (2018). Studi evaluasi kebijakan: Evaluasi beberapa kebijakan di Indonesia. Ideas Publishing.
- Amirudin, W. S. (2013). Evaluasi model CIPP (Context, Input, Process, & Product). Global Research and Consulting Institute (Global-RCI).
- Ananda, R., & Rafida, T. (2017). Pengantar evaluasi program kebijakan pemerintah. Perdana Publishing.
- Ansar, W. T. S., & Judho, D. (2019). Kebijakan pemerintah daerah. DeePublish.
- Dewi, D. S. K. (2022). Kebijakan publik: Proses, implementasi dan evaluasi. Samudra Biru.
- Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara. (2022). Kebijakan pemerintah, peluang, tantangan, dan kepemimpinan di masa dan pascapandemi Covid-19. PT Kompas Media Nusantara.

- Dunn, William N. (2018). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kelima). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. (2013). Understanding Public Policy (14th ed.). Boston: Pearson Education.
- Firdausy, C. M. (2017). Kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Grindle, Merilee S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton: Princeton University Press.
- Hariyanto, E. (2018). Pengangguran dan krisis ekonomi. Kemenkeu Learning Center (KLC).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Analisis data kualitatif: Sumber metode (Ed. ke-3). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2011). Metode penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Peters, B. Guy. (2001). The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public Administration. London: Routledge.
- Purnaweni, H. (2019). Evaluasi kebijakan publik. Laksbang PRESSindo.
- Subarsono, Agus. (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Gava Media.
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2014). Evaluation theory, models, and applications (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. CV Alfabeta.
- Suharnanik. (2023). Buku ajar: Masalah ketenagakerjaan dan pengangguran. UWKS Press.
- Van Meter, Donald S., & Van Horn, Carl E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration and Society, 6(4), 445-488.
- Zulfiyandi, R., Yolanda, R., & Khoiruroh, A. F. (2023). Ketenagakerjaan dalam data. Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan

Dasar Hukum

- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 tentang Standar Kompetensi Kerja
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 22 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 3 Tahun 2014 tentang Pelatihan Kerja dan Produktivitas

Skripsi

- Fadhilah, R. (2020). Evaluasi strategi Dinas Ketenagakerjaan dalam mengurangi angka pengangguran di Kota Palembang (Skripsi, Universitas Sriwijaya). Universitas Sriwijaya Repository.
- Fatimah, K. (2024). Evaluasi program job fair dalam penanggulangan pengangguran (studi kasus di Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang) (Skripsi, Universitas Tidar).
- Imania, M. (2021). Peran Dinas Tenaga Kerja Mataram dalam mengurangi pengangguran di Kota Mataram (Studi Kasus pada Bidang Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja) TAHUN 2020 (Doctoral dissertation, UIN Mataram). Diakses dari <https://etheses.uinmataram.ac.id/4517/>
- Ramadhani, R. W. (2022). Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/29056/>

Website

- BPS. (2024). Data Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasuruan. <https://pasuruankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/Nzcmg==/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--kabupaten-pasuruan-tahun-2011-2024.html>
- BPS. (2024). Data Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQjmg==/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-provinsi-jawa-timur.html>
- <https://HelloWork.pasuruankab.go.id/>
- BPS. (2024, December). Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Agustus 2024. <https://www.bps.go.id/id/Id/Publication/2024/12/09/6f1fd1036968c8a28e4cfe26/Keadaan-Angkatan-Kerja-Di-Indonesia-Agustus-2024.Html>.
- Eka Maria. (2024). Atasi Problematika Ketenagakerjaan, Pemkab Pasuruan Gelar Sosialisasi Dan Pembentukan Tim Training Need Analysis. <https://www.pasuruankab.go.id/Isiberita/Atasi-Problematika%20Ketenagakerjaan-Pemkab-Pasuruan-Gelar-Sosialisasi-Dan-Pembentukan-Tim-Training-Need-Analysis>.
- RRI. (2024, 8 Mei). Kasus Perselisihan Ketenagakerjaan di Pasuruan Meningkat. <https://www.rri.co.id/daerah/1566493/kas>

us-perselisihan-ketenagakerjaan-di-
pasuruan-meningkat